



Laporan Lapangan

Studi Kredit Kecil Perkotaan di Kota Yogyakarta

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-336336, Fax: 62-21-330850, Email: smeru@smeru.or.id, Web: www.smeru.or.id.

Pamadi Wibowo

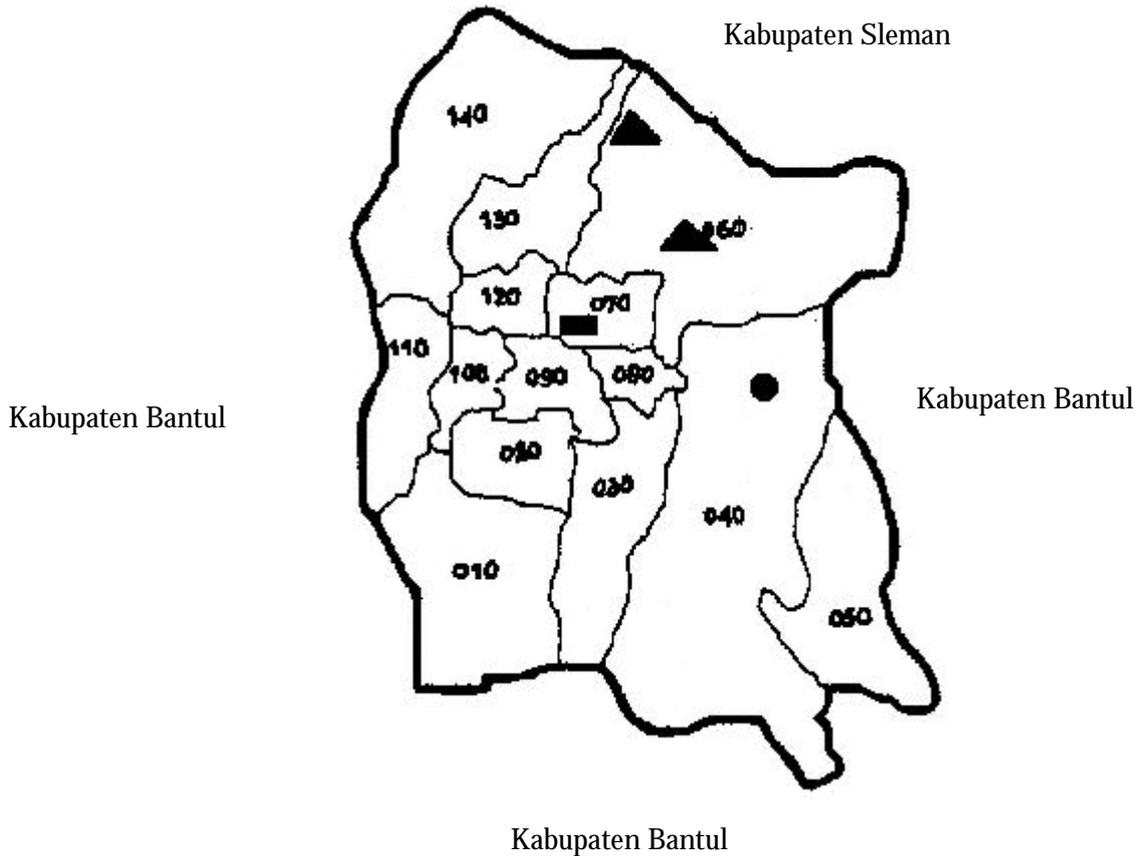
Wawan Munawar

Laporan dari Lembaga Penelitian SMERU, dengan dukungan dari AusAID dan Ford Foundation.

Juni 2002

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KOTAMADYA YOGYAKARTA

Skala 1 : 94.800



Legenda:

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Ibukota Propinsi
- Ibukota Kota
- ▲ Lokasi Penelitian

Kode	Nama Kecamatan
010	Mantriheron
020	Kraton
030	Mergangsan
040	Umbulharjo
050	Kotagede
060	Gondokusuman
070	Danurejan
080	Pakualaman
090	Gondomanan
100	Ngampilan
110	Wirobrajan
120	Gedong Tengen
130	Jetis
140	Tegalrejo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR KOTAK	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	1
Ruang Lingkup Pengamatan	1
Metode Pengamatan	2
II. KARAKTERISTIK DAERAH PENELITIAN	4
Gambaran Umum Wilayah	4
Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat	7
Dinamika Masyarakat pada Saat Krisis	9
III. KREDIT PERKOTAAN DAN PILIHAN MASYARAKAT	11
Kredit Formal	11
Kredit Informal	16
Kredit Program	21
IV. AKSES, HAMBATAN DAN PILIHAN MASYARAKAT TERHADAP KREDIT	27
Akses	27
Pilihan Masyarakat terhadap Kredit	27
Hambatan	28
V. KESIMPULAN	30

DAFTAR TABEL

1	Luas Wilayah Kelurahan Terban Menurut Penggunaannya, Tahun 1999	5
2	Luas Wilayah Kelurahan Klitren Menurut Penggunaannya, Tahun 1999	5
3	Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Terban	6
4	Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Klitren	9
5	Kupedes BRI Unit Terban, Tahun 1997	11
6	Kupedes BRI Unit Terban, Tahun 1997	12
7	Simpanan BRI Unit Terban, Tahun 1997	12
8	Simpanan BRI Unit Terban, Tahun 1997	12
9	Data Pinjaman PDM-DKE Tahap I Kelurahan Klitren	25

DAFTAR KOTAK

1	Contoh Kasus Penggunaan Kredit Nasabah UPPKS Melati I	24
2	Ibu YS dan P2KP : Strategi Keluarga Ibu YS	26

DAFTAR SINGKATAN

BDE	: Bank Daya Ekonomi
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
BNI	: Bank Negara Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUKP	: Badan Usaha Kredit Perdesaan
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Faskel	: Fasilitator Kelurahan
Golbertap	: Golongan Berpenghasilan Tetap
IPTW	: Insentif Pembayaran Tepat Waktu
Kandepkop	: Kantor Departemen Koperasi
KM	: Kader Masyarakat
KMW	: Konsultan Manajemen Teknis
KUT	: Kredit Usaha Tani
LSM	: Lembaga Swadaya masyarakat
PDM-DKE	: Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
PKM	: Program Kredit Mikro
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PMD	: Pembangunan Masyarakat Desa
P2KP	: Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PUKY	: Paguyuban Urusan Kematian Yogyakarta
SHU	: Sisa Hasil Usaha
SKU	: Surat Kelayakan Usaha
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
UED	: Usaha Ekonomi Desa
UED-SP	: Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UPPKA	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor
UPPKS	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penelitian singkat tentang kredit perdesaan di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Tanggamus, Minahasa, dan Kupang, sudah selesai dilakukan oleh Tim SMERU pada bulan Juli 2000. Guna melengkapi dan menambah informasi tentang keberadaan kredit sebelum dan semasa krisis ingga penelitian berlangsung, Tim SMERU melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kredit di wilayah perkotaan.

B. Tujuan

Penelitian kredit perkotaan ini bertujuan untuk mengetahui :

- Lembaga kredit dan kelompok simpan-pinjam yang ada di wilayah kecamatan dan kelurahan yang diteliti;
- Jenis kredit, mekanisme, pengelolaan kredit, sumber dana dan kegiatan kelompok simpan-pinjam;
- Jenis kredit dan simpan-pinjam yang paling diminati oleh masyarakat;
- Penggunaan kredit dan simpan-pinjam oleh masyarakat;
- Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses kredit dan kelompok simpan-pinjam; dan
- Kendala yang dihadapi oleh pengelola kredit dan kelompok simpan-pinjam.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian kredit perkotaan ini dikhususkan pada kegiatan utang-piutang, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang, untuk keperluan produksi atau konsumsi yang menetapkan biaya atau bunga¹ yang dapat diakses oleh masyarakat perkotaan. Ditinjau dari sisi penyedia kredit, kredit perkotaan ini dikelompokkan menjadi kredit formal, informal, dan program. Kredit formal adalah kredit yang disediakan oleh lembaga kredit formal yang berbadan hukum, baik bank maupun non-bank. Kredit informal adalah kredit yang disediakan oleh suatu lembaga atau perorangan yang tidak berbadan hukum, seperti pelepas uang, warung/toko, tukang kredit, dan kelompok simpan-pinjam, sedang Kredit program adalah kredit yang disediakan melalui program-program pemerintah yang mempunyai tujuan khusus dan diberikan dalam kurun waktu tertentu.

Penerima manfaat kredit dalam penelitian ini adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat. Perusahaan yang dapat mengakses kredit tidak menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini masyarakat perkotaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu masyarakat yang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan

¹ Pada saat di lapangan, Peneliti SMERU juga menemukan kegiatan utang-piutang yang tidak menetapkan biaya atau bunga namun menerapkan *infaq* yang besarnya tidak ditetapkan.

pemberi kredit formal dan masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan. Masyarakat yang dapat memenuhi persyaratan diasumsikan mereka cukup mudah mengakses kredit dari sejumlah bank sesuai dengan plafon yang diinginkan. Banyaknya bank sebagai sumber kredit dengan berbagai persyaratannya dijadikan alternatif untuk memperoleh kredit, sehingga jenis kredit dan lembaga kredit yang dipilih adalah keputusan setelah mempertimbangkan kerugian dan keuntungannya.

Sebaliknya, kelompok kedua adalah masyarakat yang tidak sanggup memenuhi persyaratan pemberi kredit. Bahkan untuk kredit program dari pemerintah saja masih banyak masyarakat merasa persyaratannya sangat sulit untuk dipenuhi. Sumber pinjaman bagi masyarakat seperti ini hanya terbatas pada kelompok simpan-pinjam dan perorangan.

Perbedaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat tersebut dalam kaitannya dengan akses kredit perkotaan merupakan keadaan yang menarik untuk dikaji. Ruang lingkup penelitian ini terutama adalah masyarakat perkotaan yang mempunyai keterbatasan dalam mengakses kredit formal dari bank maupun non-bank.

D. Metode Pengamatan

Penelitian kualitatif terhadap kredit perkotaan ini menggunakan metode pengumpulan data secara cepat melalui: i) wawancara mendalam dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya; ii) diskusi kelompok; dan iii) pengamatan langsung di wilayah penelitian. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan guna melengkapi informasi yang diperlukan.

Pemilihan lokasi

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipilih karena berdasarkan data Survey Nasional Kecamatan² wilayah ini adalah salah satu daerah perkotaan yang terparah terkena dampak krisis ekonomi.

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Propinsi dan Bappeda Kota Yogyakarta serta dengan mempertimbangkan variasi mata pencaharian dan keberadaan kredit, Tim SMERU memilih Kecamatan Gondokusuman sebagai wilayah pengamatan. Kemudian dipilih Kelurahan Klitren dan Kelurahan Terban dengan memperhatikan: i) variasi mata pencaharian dan kredit program yang diluncurkan sejak tahun 1980an dan masih berjalan hingga penelitian berlangsung; ii) pelaksanaan dana bergulir Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) hingga saat penelitian berlangsung; iii) alokasi dana dari program pemerintah yang baru diluncurkan, yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); iv) variasi kelompok simpan-pinjam; dan v) tingkat pengembalian kredit program dan kegiatan kelompok simpan-pinjam.

Waktu Penelitian

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan selama tiga minggu pada bulan September-Oktober 2000 oleh Tim SMERU yang terdiri dari dua orang peneliti.

² Sudarno Sumarto, Anna Wetterberg, dan Lant Pritchett, "Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia: Hasil Survei Nasional Kecamatan", 1998.

Sumber Informasi

Informasi diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Bappeda, Sekretariat Daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Rakyat Indonesia, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).
2. Kota Yogyakarta: Bappeda, Sekretariat Kota, BPS, Kantor Departemen Koperasi (Kandepkop), Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Kecamatan Gondokusuman: Camat, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (Kasi PMD), pengelola Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP), dan BRI Unit Terban.
4. Kelurahan Terban dan Kelurahan Klitren: Lurah, ketua Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa (LKMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Fasilitator Kelurahan (Faskel), anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kader Masyarakat (KM), pengelola Usaha Ekonomi Desa (UED), pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan, pengelola Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta warga masyarakat.
5. LSM: Gifari

II. KARAKTERISTIK DAERAH PENELITIAN

Kota Yogyakarta adalah salah satu dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus merupakan ibukota Propinsi. Daerah ini memiliki luas wilayah 32,5 km², terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Pada tahun 1997 penduduknya berjumlah 475.974 jiwa atau 94.548 KK.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai daerah pusat industri kerajinan, perdagangan, pendidikan, dan kota pariwisata. Di kota ini terdapat Universitas Gajah Mada (UGM) dan beberapa universitas lainnya yang menjadi tujuan dari para pelajar di seluruh Indonesia untuk meraih jenjang pendidikan tinggi.

A. Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Gondokusuman dengan luas wilayah 3,99 km² merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Mendagri No : 140-263 tahun 1981, tentang Pembentukan Kelurahan-Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan ini juga merupakan salah satu pusat perdagangan dan pendidikan di Propinsi DIY. Jumlah penduduk Kecamatan Gondokusuman pada akhir tahun 1999 tercatat 71.442 jiwa, terdiri dari 37.833 laki-laki dan 33.609 perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 17.905 jiwa/km².

Sebagai salah satu pusat perdagangan dan pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta, banyak masyarakat Kecamatan Gondokusuman yang bekerja di bidang jasa dan perdagangan, atau bekerja di bidang yang berkaitan dengan pendidikan. Di Kecamatan ini terdapat tiga SMU Negeri, tujuh SMU Swasta, beberapa universitas swasta, dan terutama Universitas Gajah Mada, dengan demikian banyak pelajar dan mahasiswa bermukim di wilayah Kecamatan Gondokusuman. Disamping itu banyak lembaga keuangan formal seperti bank yang beroperasi di wilayah ini.

Kecamatan Gondokusuman juga merupakan pusat pelayanan kesehatan di Propinsi DIY. Sekitar 34% dokter di DIY membuka praktek di wilayah Kecamatan Gondokusuman (78 dokter dari 226 dokter). Disamping itu, Kecamatan Gondokusuman merupakan lokasi rumah sakit swasta terbesar di Kota Yogyakarta, R.S. Panti Rapih.

Kelurahan Terban

Kelurahan Terban terbagi atas 12 RW dengan luas wilayah 81,19 ha. Sekitar 70,79% (57,48 ha) dari wilayahnya adalah untuk pemukiman penduduk, sisanya 29,21% (23,71 ha) digunakan untuk bangunan perkantoran, sekolah, pertokoan, sarana peribadatan, dan sarana umum (jalan, terminal, pasar, kuburan, dan sarana olah-raga). Jumlah penduduk 14.409 jiwa, terdiri dari 7.137 laki-laki dan 7.272 perempuan.

Tabel. 1 Luas Wilayah Kelurahan Terban Menurut Penggunaannya, 1999

No.	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman penduduk	57,48	70,79
2.	Bangunan Perkantoran	9,75	12,00
3.	Bangunan Sekolah	3,42	4,21
4.	Bangunan Pertokoan	1,75	2,16
5.	Bangunan Pasar	0,50	0,62
6.	Bangunan Terminal	0,50	0,62
7.	Bangunan Tempat Peribadatan (masjid, gereja, dan vihara)	2,15	2,65
8.	Kuburan	2,60	3,20
9.	Jalan	1,42	1,75
10.	Rekreasi dan Olah Raga	1,09	1,34
11.	Kolam ikan	0,03	0,04
12.	Lain-lain	0,50	0,62
	Jumlah	81,19	100,00

Sumber : Profil Kelurahan Terban Tahun 1999

Wilayah ini sangat dekat dengan kampus Universitas Gajah Mada (UGM) dan beberapa universitas lainnya, sehingga penghasilan utama dan tambahan bagi penduduk diperoleh dari hasil sewa kamar, warung makan, atau usaha lain yang diperlukan para mahasiswa.

Kelurahan Klitren

Kelurahan Klitren terbagi atas 16 RW dengan luas wilayah 83,12 ha. Jumlah penduduknya 16.572 jiwa, terdiri dari 8.106 laki-laki dan 8.466 perempuan. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pertokoan (48,24%), perkantoran (32,72%), sisanya (19,04%) digunakan untuk jalan dan pemukiman umum (lihat Tabel 2).

Tabel. 2 Luas Wilayah Kelurahan Klitren Menurut Penggunaannya 1999

No.	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman umum	6,01	7,24
2.	Bangunan Perkantoran	27,20	32,72
3.	Bangunan Pertokoan	40,10	48,24
4.	Bangunan Pasar	1,61	1,94
5.	Jalan	8,20	9,86
	Jumlah	83,12	100,00

Sumber : Profil Kelurahan Klitren Tahun 1999

Kelurahan Klitren adalah wilayah yang dikelilingi oleh pertokoan, sedangkan wilayah pemukiman penduduk berada di dalamnya. Kelurahan Klitren juga dekat dengan Universitas Gajah Mada dan beberapa universitas swasta serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Tabel. 3 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Terban

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
I.	Industri		
1.	Pengusaha Kerajinan	5	0,06
2.	Pengusaha Industri Rumah Tangga	75	0,94
3.	Buruh Industri Kecil, Kerajinan, Rumah tangga	240	3,00
4.	<i>Buruh Industri Sedang-Besar</i>	1.542	19,28
II.	Jasa		
1.	Pegawai kelurahan	4	0,05
2.	Guru	157	1,96
3.	Pegawai negeri sipil/ABRI	715	8,94
4.	Mantri Kesehatan/Perawat	78	0,98
5.	Bidan	9	0,11
6.	Dokter	32	0,40
7.	PNS lainnya	129	1,61
8.	Pensiunan ABRI/Sipil	162	2,02
9.	<i>Pegawai Swasta</i>	1.319	16,49
10.	Pegawai BUMN/BUMD	49	0,61
11.	Pensiunan Swasta	71	0,89
12.	Perbankan	45	0,56
13.	Perkreditan Rakyat	3	0,04
14.	Asuransi	21	0,26
15.	Pedagang Pasar	30	0,38
16.	Warung	431	5,39
17.	Kios	161	2,01
18.	Toko	289	3,61
19.	Hotel	180	2,25
20.	Asrama/Pondokan	246	3,08
21.	Angkutan tak bermotor	30	0,38
22.	Angkutan Sepeda motor	5	0,06
23.	Mobil Kendaraan Umum	84	1,05
24.	Rumah Produksi	60	0,75
25.	Video Game/ VCD	20	0,25
26.	Notaris	2	0,02
27.	Pengacara	3	0,04
28.	Tukang Kayu	58	0,72
29.	Tukang Batu	53	0,66
30.	Tukang Jahit/ Bordir	65	0,81
31.	Tukang Cukur	8	0,10
32.	Konstruksi	3	0,04
33.	Jasa Persewaan	15	0,19
34.	Jasa Kemasyarakatan Umum dan Perorangan	76	0,95
35.	Pemulung	15	0,19
36.	Salon	121	1,51
37.	<i>Wiraswasta</i>	1.360	17,00
III.	Peternakan		
1.	Peternak sapi	1	0,01
2.	Peternak Kambing	1	0,01
3.	Peternak Ayam	25	0,31
4.	Peternak Ikan	2	0,02
	Jumlah	7.999	100,00

Sumber : Profil Kelurahan Terban Tahun 1999

B. Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat

Kelurahan Terban

Struktur sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Terban dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari matapencaharian penduduknya, dan kedua, berdasarkan wilayah tempat tinggalnya matapencaharian penduduk wilayah Kelurahan Terban sangat beragam, antara lain sebagai pegawai negeri sipil, jasa, perdagangan, wiraswasta, dan buruh industri. Buruh industri menempati urutan pertama matapencaharian masyarakat Kelurahan Terban (1542 orang), diikuti oleh wiraswasta (1360 orang), dan selanjutnya pegawai negeri sipil (1319 orang).

Dari sisi wilayah tempat tinggal, struktur sosial ekonomi masyarakat terbagi dalam dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama adalah masyarakat Terban yang tinggal di bantaran Kali Code. Sedangkan kelompok kedua umumnya tinggal di perumahan dengan tingkat sosial ekonomi lebih baik dibandingkan dengan kelompok pertama.

Pada awalnya tanah yang ditempati kelompok pertama adalah *Tanah Bong*³ yang dikelola oleh Paguyuban Urusan Kematian Yogyakarta (PUKY)⁴. Pada tahun 1970 PUKY menyerahkan pengelolaan Tanah Bong secara lisan kepada Keraton. Baru pada tanggal 20 Agustus 2000 pihak keraton secara resmi menyerahkan masalah status *Tanah Bong* kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini masyarakat sedang menunggu Surat Keputusan Gubernur mengenai status tanah tersebut. Dengan kepastian hukum kepemilikan tanah tersebut, masyarakat merasa tenang dan tidak lagi khawatir sewaktu-waktu diusir karena tanahnya akan dijadikan kawasan hijau.

Perbedaan antara dua kelompok masyarakat ini sering menimbulkan kecemburuan sosial di masing-masing kelompok. Misalnya, jika program-program pemerintah dilaksanakan di wilayah kelompok pertama, maka kelompok kedua berkomentar *Sebaiknya wilayah kami juga diperhatikan*". Demikian juga sebaliknya, jika ada program pemerintah yang dilaksanakan di wilayah kelompok kedua, maka kelompok pertama berkomentar *"Untuk apa membantu masyarakat yang tingkat perekonomiannya sudah mapan"*.

Saat ini petugas sosial yang merangkap sebagai ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Terban sedang mengusahakan suatu kegiatan atau program yang mampu menjembatani kedua kelompok tersebut. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terjalin suatu kerjasama, komunikasi, dan hubungan sosial yang baik antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Selain itu juga untuk menghindari adanya kesenjangan sosial.

³ Tanah Bong adalah tanah tempat pemakaman untuk orang Tionghoa.

⁴ Pada tahun 1989 Kanjeng Ratu Kiemas mengunjungi kawasan Kali Code bertepatan dengan hari ulang tahun putrinya dirayakan bersama masyarakat di salah satu balai RW. Dalam kesempatan itu, Ratu Kanjeng Himas meminta masyarakat di wilayah itu untuk mendukung suaminya yang akan naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu, disampaikan juga bahwa Sultan Hamengkubuwono X akan membantu masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai status **Tanah Bong** yang mereka tempati.

Karena ruang lingkup penelitian difokuskan kepada masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam mengakses kredit formal, maka penelitian tentang kredit perkotaan di Kelurahan Terban dilakukan di wilayah bantaran Kali Code.

Pada awalnya wilayah Kali Code merupakan pemukiman kumuh. Keadaan ini menimbulkan masalah sosial dan mendorong masyarakat mengabaikan masalah kesehatan, misalnya mengenai sarana air bersih. Akibatnya, kebersihan lingkungan dan kesehatan tidak terpelihara.

Keadaan masyarakat Kali Code mulai berubah setelah adanya pendampingan dan pembinaan oleh Romo Mangun sejak tahun 1970. Pendampingan dan pembinaan ini menyangkut semua aspek kehidupan. Dengan ketekunan dan kesabaran, masyarakat diberi pembinaan tentang kebersihan, mulai dari kebersihan tempat tinggal, kebersihan lingkungan, hingga pembinaan hidup bermasyarakat, termasuk pendidikan dan sentuhan rohani. Pembinaan juga diberikan dalam bentuk contoh nyata, berupa pembuatan rumah-rumah contoh layak huni di lingkungan Kali Code. Masyarakat dapat melihat sendiri lingkungan seperti apa yang seharusnya dibentuk dengan memperhatikan karakter masyarakat dan kondisi lingkungan.

Hasil pendampingan dan pembinaan Romo Mangun pada masyarakat Kali Code dapat dilihat saat ini. Hampir seluruh lingkungan pemukiman di Bantaran Kali Code sudah disemen dan tertata dengan baik. Masyarakat kini dapat menikmati sarana air bersih melalui Perusahaan Air Minum (PAM). Kebersihan Kali Code sendiri terjaga dengan baik, karena masyarakat tidak lagi membuang sampah ke Kali Code tetapi dikoordinir oleh RT masing-masing dengan membayar retribusi sampah.

Kelurahan Klitren

Berbeda dengan Kelurahan Terban yang masyarakatnya terbagi atas dua kelompok, masyarakat Kelurahan Klitren menempati satu daerah pemukiman yang tidak dipisahkan oleh tingkat sosial dan ekonomi. Masyarakat yang mempunyai toko, umumnya tinggal di sepanjang jalan raya, dimana warganegara keturunan Tionghoa mendominasi area pertokoan ini.

Mata pencaharian masyarakat Klitren antara lain sebagai karyawan toko, guru, pegawai negeri, tukang becak, dan kusir. Banyak masyarakat Klitren yang membuka usaha sewa kamar, Wartel (Warung Tekpon), warung kelontong, dan warung makan yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Usaha-usaha yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pelajar atau mahasiswa merupakan ciri khas kegiatan perekonomian masyarakat Kelurahan Klitren (lihat Tabel 4).

Banyaknya usaha warung makan telah menimbulkan persaingan ketat. Masing-masing warung mempunyai strategi sendiri untuk menarik minat para pelanggannya. Kerja sama sesama pedagang kecil dan warung juga dapat dilihat di wilayah ini.

Biasanya warung-warung mengadakan kerjasama dengan penjual kue-kue gorengan dari RT yang sama. Pemilik warung menyediakan semua kebutuhan penjual gorengan seperti tepung, minyak goreng dan bumbu masak. Kemudian pemilik warung menerima titipan dari si penjual kue gorengan. Ciri khas yang menarik yang ditemui di wilayah ini adalah semua transaksi jual-beli harus kontan, dan tidak melayani hutang.

C. Dinamika Masyarakat Pada Saat Krisis

Dampak krisis yang dirasakan masyarakat Kelurahan Terban dan Klitren umumnya sama dengan masyarakat perkotaan lainnya, yaitu melonjaknya harga bahan pokok. Dampak ini selanjutnya berkembang menjadi masalah lain yang berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi masyarakat. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan dampak krisis yang tidak dapat dihindari oleh sebagian masyarakat yang bekerja di sektor perbankan dan beberapa kegiatan sektor industri yang mengandalkan bahan baku dari luar negeri.

Masyarakat melakukan berbagai strategi agar tetap bertahan dan dapat menjalankan kegiatan ekonomi rumah tangganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Upaya yang dilakukan sangat tergantung pada berbagai faktor, antara lain jenis usaha yang dijalankan dan informasi mengenai sumber kredit.

Tabel. 4 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Klitren

No.	Mata pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
I.	Jasa		
1.	Pegawai Kelurahan	7	0,07
2.	Guru	2.151	22,01
3.	Pegawai Negeri Sipil/ABRI	1.433	14,67
4.	Mantri Kesehatan/Perawat	1	0,01
5.	Dokter	3	0,03
6.	Bidan	4	0,04
7.	Pensiunan ABRI/Sipil	513	5,25
8.	Pegawai Swasta	2.596	26,57
9.	Perkreditan Rakyat	4	0,04
10.	Pedagang Pasar	1	0,01
11.	Pedagang Warung	35	0,36
12.	Pedagang Kios	40	0,41
13.	Pedagang Toko	70	0,72
14.	Hotel	3	0,03
15.	Asrama/Pondokan	1	0,01
16.	Angkutan tak bermotor	725	7,42
17.	Mobil Kendaraan Umum	58	0,59
18.	Notaris	2	0,02
19.	Pengacara	1	0,01
20.	Konsultan	1	0,01
21.	Tukang Kayu	15	0,15
22.	Tukang Batu	20	0,21
23.	Tukang Jahit/Bordir	50	0,51
24.	Tukang Cukur	2	0,02
25.	Listrik, Gas dan Air	1	0,01
II.	Peternakan		
1.	Peternak Sapi	2	0,02
2.	Peternak Ayam	2.030	20,78
3.	Peternak Kuda	2	0,02
	Jumlah	9.771	100,00

Sumber : Profil Kelurahan Klitren Tahun 1999

Walaupun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan usaha berbeda antar masyarakat tetapi ada juga kesamaannya, terutama dalam mengupayakan modal tambahan. Misalnya, Ibu Y seorang janda (50 tahun) dari kelurahan Terban yang mempunyai usaha warung makan di depan Rumah Sakit Panti Rapih. Ibu Y tidak dapat menaikkan harga jual makanan karena pelanggannya kebanyakan adalah tukang becak. Akhirnya ia hanya menaikkan harga kepada pelanggan yang bukan tukang becak. Semasa krisis, tidak jarang jualannya tidak habis sehingga terpaksa dikonsumsi sendiri dan sisanya dibuang, padahal Ibu Y masih memerlukan modal agar dapat terus berjualan.

Sebaliknya Pak H yang mempunyai usaha sebagai tukang tambal ban sepeda motor tidak merasakan perubahan yang besar pada saat krisis karena usahanya merupakan bagian vital dari kegiatan transportasi. Orang akan tetap menambal ban sepeda motornya agar dapat melakukan kegiatan usahanya. Kasus Pak H ini tidak berlaku secara umum, karena umumnya masyarakat Kelurahan Terban yang tinggal di bantaran Kali Code mempunyai usaha warung makan, penjual kue gorengan, bakulan, atau pedagang kaki lima.

Upaya lain yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan saat krisis adalah meminjam uang. Sebagian besar anggota masyarakat enggan mencari pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank karena tidak dapat memenuhi persyaratan agunan yang ditetapkan oleh pihak bank. Pilihan utama adalah lembaga keuangan informal yang prosesnya cepat dengan persyaratan sederhana seperti kelompok-kelompok arisan atau simpan pinjam yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.⁵

Selain kelompok arisan juga ditemui kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar kepentingan usaha dan sosial, yaitu paguyuban. Pada kelompok paguyuban, besar pinjaman sangat tergantung pada jenis usaha dan tujuannya. Sedang besar pinjaman dari perorangan (rentenir) seperti bank *plecit*, lebih fleksibel, tergantung pada kebutuhan dan hubungan antara peminjam dan pemberi kredit. Bunga yang ditetapkan rentenir sangat tinggi, berkisar 20% per bulan. Kredit dari rentenir ini masih berjalan tetapi jumlah peminjamnya sudah berkurang.

Sebagian masyarakat juga memanfaatkan pegadaian dalam memperoleh alternatif pinjaman. Besarnya pinjaman sangat tergantung pada harga taksiran barang yang digadaikan.

Masyarakat juga dapat memperoleh pinjaman dari kredit program pemerintah, yaitu UPPKS, UED, UED-SP, PDM-DKE, dan P2KP. Namun besarnya pinjaman kredit program ini umumnya sangat kecil. Karena tujuan kredit program adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, tidak semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap program-program tersebut.

⁵ Misalnya, ibu-ibu anggota Dasawisma, semasa krisis mengalami peningkatan pinjaman baik intensitas maupun jumlahnya. Namun kebanyakan ibu-ibu meminjam tanpa izin suami yang bersangkutan karena tidak ingin diketahui oleh suaminya dengan alasan antara lain: i) khawatir tidak diizinkan; ii) khawatir suami merasa malu kalau istrinya meminjam; iii) khawatir suami menilai isteri tidak mampu mengelola uang belanja.

III. KREDIT PERKOTAAN DAN PILIHAN MASYARAKAT

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang bersifat produktif maupun konsumtif, masyarakat perkotaan berusaha mendapatkan pinjaman, misalnya dari kredit formal, kredit informal, dan kredit program.

A. Kredit Formal

Lembaga Keuangan Bank

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BRI adalah salah satu bank yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pinjaman, baik melalui Kupedes maupun kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap). Pada pertengahan tahun 1997 di BRI Unit Terban pernah terjadi peningkatan simpanan regional sebesar 70%. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: i) likuidasi bank swasta; ii) bunga deposito tinggi (pernah mencapai 60%); dan iii) jumlah simpedes cenderung selalu meningkat.

Berdasarkan data BRI Yogyakarta Cabang Katamso, terjadi penurunan pinjaman (35,20%) di BRI Unit Terban, dari Rp177.850.000 pada bulan Desember 1996 menjadi Rp115.250.000 pada bulan Desember 1997.

Berdasarkan penjelasan salah satu staf BRI, sejak krisis pertengahan bulan Juli 1997 pinjaman di BRI Unit Terban mengalami penurunan, walaupun kemudian mulai tahun 1998 mengalami peningkatan lagi. Hal ini terjadi antara lain karena perekonomian nasional mengalami kelesuan. Banyak pengusaha kecil sangat tergantung pada pengusaha besar, sementara pengusaha besar sendiri juga mengalami kelesuan. Pada saat krisis banyak pengusaha besar mengajukan pinjaman dalam jumlah kecil hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak BRI. Sebelum krisis besarnya pinjaman yang diajukan biasanya Rp15 juta tetapi pada saat krisis hanya Rp1 juta.

Perkembangan jumlah pinjaman dan simpanan pada saat krisis dapat dilihat dari data perkembangan pinjaman dan simpanan di BRI Unit Terban pada tahun 1996 dan 1997 berikut ini (lihat Tabel. 5 – Tabel 8).

Tabel. 5 Kupedes BRI Unit Terban, 1996 dan 1997

No.	Uraian	Desember 1996	Desember 1997
1.	Jumlah kredit (Rp.)	177.850.000	115.250.000
2.	Sisa Tunggalan (Rp.)	33.956.000	37.084.000
3.	Nasabah (orang)	1.012	994

Sumber : BRI Yogyakarta Cabang Katamso

Tabel. 6 Kupedes BRI Unit Terban, Tahun 1997 (dalam ribuan Rp)

No.	Bulan	Kredit	Tunggakan	Nasabah (org)
1.	Januari	126.850	35.618	990
2.	Pebruari	94.050	39.159	978
3.	Maret	110.050	37.578	985
4.	April	114.450	37.930	979
5.	Mei	127.700	39.527	978
6.	Juni	146.000	41.803	962
7.	Juli	146.000	39.582	971
8.	Agustus	157.100	38.148	1.001
9.	September	147.750	39.306	1.003
10.	Oktober	205.050	37.565	1.023
11.	Nopember	213.650	39.411	1.016
12.	Desember	115.250	37.084	994

Sumber : BRI Yogyakarta Cabang Katamso

Tabel. 7 Simpanan BRI Unit Terban, Tahun 1996 dan 1997

No.	Uraian	Desember 1996	Desember 1997
1.	Giro (Rp)	8.321.000	-
2.	Tabanas Iraska (Rp)	243.773.000	278.832.000
3.	Simaskot (Rp)	542.200.000	590.741.000
4.	Simpedes (Rp)	489.600.000	466.877.000
5.	Deposito (Rp)	313.200.000	665.200.000
6.	Deantuna (Rp)	85.500.000	10.000.000

Sumber : BRI Yogyakarta Cabang Katamso

Tabel. 8 Simpanan BRI Unit Terban, Tahun 1997 (dalam ribuan Rp)

No	Bulan	Giro	Tabanas Iraska	Simaskot	Simpedes	Deposito	Deantuna
1.	Januari	7.866	206.455	504.769	467.978	302.200	69.500
2.	Pebruari	8.238	205.255	528.275	413.349	303.700	69.500
3.	Maret	139	200.843	532.903	414.838	320.750	109.500
4.	April	138	200.527	525.944	411.334	336.750	109.500
5.	Mei	-	205.678	539.949	430.518	319.750	109.500
6.	Juni	-	197.734	528.324	481.116	297.250	59.500
7.	Juli	-	198.690	570.296	525.430	304.750	59.500
8.	Agustus	-	245.421	602.209	470.724	485.500	18.000
9.	September	-	198.479	526.725	486.594	641.700	18.000
10.	Oktober	-	197.484	518.499	427.863	644.200	18.000
11.	Nopember	-	291.815	633.445	516.980	543.700	18.000
12.	Desember	-	278.832	590.741	466.877	665.200	10.000

Sumber : BRI Yogyakarta Cabang Katamso

2. Bank Pembangunan Daerah DIY (BPD-DIY)

BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dua jenis kredit yaitu, kredit komersial dan kredit non-komersial. Kredit non-komersial adalah kredit untuk program tertentu, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kredit Usaha Tani (KUT), koperasi, dan transportasi. Sedangkan kredit komersial adalah kredit lainnya selain kredit program, misalnya: kredit perumahan dan kredit pembangunan. Persyaratan kredit program biasanya tidak terlalu rumit. Untuk kredit komersial pihak BPD menetapkan persyaratan yang sangat ketat, termasuk jaminan.

Sebagai bank yang mempunyai hubungan dengan pemerintah, pada tahun 1984 BPD melakukan pembinaan untuk program Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang dilaksanakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Program tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1989. Tujuan BUKP adalah untuk melayani masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Kantor BUKP ada di setiap kecamatan. Saat ini di DIY terdapat 75 kecamatan yang mempunyai BUKP. Besarnya modal usaha setiap unit BUKP tidak sama, tergantung potensi wilayah yang akan dikembangkan dan kemampuan manajemen, rata-rata mencapai Rp75 juta.

Pada saat krisis, BPD DIY telah menurunkan beberapa skema kredit khusus untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dampak krisis, yaitu: kredit untuk koperasi yang berbasis Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dengan total kredit Rp6 milyar, kredit untuk modal usaha kecil dengan batas kredit maksimal Rp5 juta, sedangkan kredit investasi dengan plafon Rp25 juta (bunga 16% per tahun menurun), dan KUT. Namun di dua kelurahan yang diamati tidak ditemukan masyarakat yang mengakses skema kredit dari BPD-DIY.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR mengeluarkan tiga jenis kredit, yaitu: kredit pegawai, kredit pedagang pasar, dan Program Kredit Mikro. Besarnya *outstanding* kredit pada awal tahun 1997 (Januari 1997) Rp2.332.221.115, dan pada akhir Agustus 1997 mencapai Rp3.996.378.970. Pada awal tahun 1997 jumlah pegawai yang menjadi nasabah 1.630 orang, kemudian meningkat menjadi 1.755 orang pada bulan Agustus 1997, dan pada awal tahun 2000 menurun menjadi 1.503 orang, dengan *outstanding* Rp2.545.934.850.

Tingkat tunggakan bulan Agustus 2000 mencapai 3%. Tunggakan ini disebabkan oleh adanya peminjam yang mutasi dan meninggal. Anggota yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi, yaitu dimasukkan ke dalam daftar orang yang tidak dapat mengakses kredit lagi.

Kredit Pegawai

Kredit ini diberikan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dimana peminjam bekerja, melalui persetujuan bendahara dan diketahui kepala instansi yang bersangkutan. Jumlah pinjaman maksimal Rp10 juta dengan waktu pengembalian maksimal 40 bulan. Besarnya bunga tidak sama antara pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Kota Yogyakarta (1,6% per bulan) dengan pegawai negeri yang bekerja di luar Kota Yogyakarta (1,75% per bulan).

Persyaratan kredit pegawai antara lain: i) fotocopy SK pengangkatan terakhir; ii) pengajuan kredit yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala instansi tempat bertugas; iii) identitas diri berupa KTP/SIM; dan iv) jaminan dari badan pengawas BPR untuk pinjaman lebih dari Rp10 juta. Waktu yang dibutuhkan dari pengajuan sampai pencairan hanya satu jam untuk nasabah lama dan satu hari untuk nasabah baru.

Kredit Pedagang Pasar

Ada dua jenis kredit pedagang pasar, yaitu Kredit Pasar Harian dan Kredit Pasar Mingguan. Batas pinjaman untuk pedagang pasar Rp4 juta. Pedagang pasar yang menjadi nasabah antara lain pedagang kelontong, pedagang konveksi di Pasar Bringharjo, pedagang bumbu dapur, dan pedagang sayur.

Persyaratan pinjaman kredit pedagang pasar adalah: i) mempunyai Kartu Bukti Pedagang; ii) fotocopy KTP; iii) surat rekomendasi dari kepala desa; dan iv) syarat tambahan berupa surat tanah atau BPKB, kecuali bagi peminjam yang mempunyai tabungan di BPR. Syarat tambahan ini diperlukan untuk peminjam yang mengajukan pinjaman di atas Rp4 juta.

Besarnya bunga 3% per bulan dengan jangka waktu pengembalian enam bulan. Untuk anggota yang membayar tepat waktu diberikan IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) sebesar 0,5%. Proses pengajuan kredit sampai pencairan hanya satu hari dan dilakukan di lokasi usaha pedagang yang bersangkutan. Untuk mengetahui apakah usaha nasabah sesuai dengan permohonan kredit, BPR mempunyai petugas operasional lapangan berupa pos pelayanan yang bertugas menilai kelayakan, sekaligus melakukan penagihan angsuran.

Program Kredit Mikro (PKM)

Selain kredit pegawai dan non-pegawai, BPR juga memberikan PKM kepada kelompok pedagang pasar. Agar kelompok tersebut berkembang, BPR bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja untuk memberikan pembinaan bagi kelompok-kelompok pengrajin atau industri kecil.

Batas pinjaman PKM adalah Rp2 juta dengan bunga 2,25% merata. IPTW diberikan kepada anggota yang melunasi tepat waktu tanpa tunggakan, yaitu sebesar 0,25%, sehingga bunga efektif yang diberikan 2% per bulan. Pihak BPR yakin, di waktu mendatang program ini akan berkembang karena prosesnya sangat cepat dan belum semua pasar terjangkau. Sejak tahun 1999 hingga saat ini sudah terbentuk delapan kelompok dengan anggota 172 orang.

Kendala yang ditemui dalam melayani nasabah antara lain banyak anggota yang belum mempunyai kartu bukti pedagang. Bagi yang belum mempunyai kartu bukti pedagang dikenakan batas pinjaman Rp500 ribu, dengan syarat menyerahkan fotocopy KTP. Pihak BPR menyarankan agar pedagang yang belum mempunyai kartu bukti pedagang membentuk kelompok agar dapat mengajukan kredit.

Lembaga Keuangan Bukan Bank

1. Pegadaian

Disamping bank, Perum Pegadaian juga merupakan alternatif bagi anggota masyarakat untuk mendapat tambahan modal atau pinjaman untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak. Menurut penjelasan beberapa ibu dari kelompok diskusi, banyak masyarakat yang memperoleh pinjaman dari Perum Pegadaian. Barang yang dapat digadaikan antara lain adalah kain batik, radio, televisi, kipas angin, gerabah, emas, dan kendaraan bermotor.

Besarnya pinjaman sangat tergantung pada harga taksiran barang yang digadaikan. Harga gadai barang-barang elektronik adalah 73% dari harga pasar. Harga taksiran untuk barang-barang elektronik adalah 91% dari harga gadai. Dengan demikian besar pinjaman untuk barang-barang elektronik berkisar 91% dari harga gadai. Untuk kendaraan bermotor harga gadainya adalah 93% dari harga pasar. Harga taksiran sekitar 88% dari harga gadai. Jadi besarnya pinjaman untuk kendaraan bermotor berkisar 88% dari harga gadai.

Harga taksiran perhiasan emas ditentukan oleh kantor pusat dan berlaku untuk semua wilayah. Jangka waktu pengembalian adalah empat bulan dengan bunga tergantung pada besar pinjaman: i) golongan A: pinjaman Rp5 ribu - Rp40 ribu, bunga 2,5%; ii) golongan B: pinjaman di atas Rp40 ribu - Rp150 ribu, bunga 2,5%; iii) golongan C: pinjaman di atas Rp150 ribu - Rp500 ribu, bunga 3%; iv) golongan D: pinjaman di atas Rp500 ribu - Rp20 juta, bunga 3,5%.

Syarat untuk menggadaikan emas hanya menyerahkan fotocopy KTP. Sedangkan untuk kendaraan bermotor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan surat pernyataan dari pemilik. Waktu yang diperlukan dari proses pengajuan hingga pencairan hanya 15 menit.

2. BUKP (Badan Usaha Kredit Perdesaan)

BUKP Kecamatan Gondokusuman dibentuk pada bulan Januari tahun 1997 dengan anggota 100 orang. Pengurus BUKP terdiri dari kepala kantor, pemegang buku, dan pemegang kas. Insentif yang diterima oleh pengelola saat ini dirasakan masih relatif kecil.

Karena sosialisasi mengenai BUKP kurang merata, perkembangan jumlah anggotanya tidak begitu pesat. Saat ini jumlah anggota hanya 150 orang. Syarat menjadi anggota BUKP adalah bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gondokusuman, menyerahkan fotocopy KTP suami-istri, mempunyai usaha, surat permohonan kredit yang diketahui oleh RT, RW, dan kelurahan setempat. Anggota diwajibkan membayar simpanan wajib.

Modal awal BUKP Kecamatan Gondokusuman Rp17 juta, selanjutnya BUKP ini mendapat pinjaman dari BPD DIY Rp30 juta, sehingga total aset yang dikelola Rp47 juta. Jumlah pinjaman yang sudah diberikan kepada anggota dalam tiga tahun terakhir adalah Rp41 juta.

Ada tiga jenis angsuran, yaitu angsuran harian, angsuran mingguan, dan angsuran bulanan. Jangka waktu pengembalian angsuran mingguan paling lama 20 minggu, untuk angsuran bulanan paling lama 18 bulan. Jenis usaha peminjam antara lain pedagang kecil, tukang becak, atau usaha sampingan seperti jual beli besi bekas.

Jumlah pinjaman umumnya berkisar antara Rp100 ribu - Rp2,5 juta dengan bunga antara 2,4% - 4%, tergantung negosiasi antara anggota dan pengelola. Bila meminjam di atas Rp 500 ribu, anggota harus memberi agunan berupa barang elektronik, BPKB, atau sertifikat tanah. Pinjaman di atas Rp2,5 juta harus disetujui atau mendapat rekomendasi dari Biro Perekonomian Tk. I DIY. Sebagian besar anggota meminjam Rp500 ribu.

Untuk menumbuhkan disiplin anggota, pihak pengelola menetapkan aturan dan sanksi, misalnya anggota yang terlambat membayar angsuran dikenakan denda sebesar 1% dari pinjaman pokok. Apabila anggota merasa keberatan, maka anggota dapat menawar hingga tercapai kesepakatan. Sebelum dikenakan sanksi anggota diberi peringatan terlebih dahulu. Peringatan diberikan kepada anggota yang terlambat membayar angsuran 1-7 hari.

Kendala pengelola BUKP dalam mengembangkan usahanya adalah kekurangan tenaga dan bunga tinggi yang ditetapkan oleh BPD pada modal pinjaman.

B. Kredit Informal

Arisan

Bentuk kelompok arisan bermacam-macam, sesuai dengan tujuan dan latar belakang anggotanya. Kelompok arisan yang banyak ditemukan di dua kelurahan yang diamati adalah arisan di tingkat RT dan RW.

Arisan adalah kegiatan simpan-pinjam dalam bentuk pertemuan rutin yang dilakukan oleh beberapa orang dalam lingkungan tertentu, misalnya Arisan Bulanan. Arisan Bulanan adalah kegiatan pertemuan bulanan mengumpulkan uang dari anggota yang jumlahnya ditentukan melalui kesepakatan anggota. Setiap bulan, setelah dana terkumpul kemudian diundi untuk menentukan anggota yang akan 'menarik' arisan. Selain arisan, kegiatan lainnya adalah simpan-pinjam.

Kegiatan arisan juga menjadi media untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan program pemerintah yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut, sebagai forum diskusi masalah hidup bermasyarakat, misalnya mengenai masalah lingkungan, pendidikan anak-anak, juga sekaligus sebagai forum untuk menyampaikan informasi yang dirasakan penting untuk disampaikan kepada anggota yang lain. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab mengenai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dialami anggota dapat disampaikan pada pertemuan arisan untuk dijadikan bahan pertimbangan anggota yang lainnya jika mengalami kasus serupa.

Kegiatan arisan dan simpan-pinjam di Bantaran Kali Code, Kelurahan Terban merupakan salah satu contoh kegiatan yang sangat menonjol karena melibatkan semua anggota keluarga. Misalnya arisan RW di Bantaran Kali Code anggotanya adalah bapak-bapak, arisan Dasawisma anggotanya terdiri dari para ibu-ibu, sedang arisan pemuda semua anggotanya adalah pemuda. Umumnya kegiatan arisan ini dilakukan setiap bulan sekali. Tetapi ada juga kelompok yang melakukan pertemuan arisan tersebut dua kali sebulan.

Pengurus arisan diganti setiap periode dengan maksud membagi tanggung-jawab, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menanamkan kepercayaan yang berikan bahwa setiap anggota mampu mengelola kelompok arisan mereka. Kelompok-kelompok arisan tersebut juga melakukan kegiatan simpan-pinjam dengan besar pinjaman tergantung pada besarnya arisan, tabungan anggota, dan banyaknya anggota yang akan meminjam. Besarnya bunga dan SHU yang akan dibagikan kepada semua anggota setiap akhir tahun juga sesuai dengan kesepakatan anggota.

Tidak berbeda dengan masyarakat Terban, di kelurahan Klitren juga terdapat berbagai kegiatan kelompok arisan. Dalam arisan ini, kegiatan simpan-pinjam, tabungan sukarela dan dana sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Di tingkat RW terdapat kelompok arisan yang anggotanya bapak-bapak sebagai kepala keluarga. Kelompok arisan ibu-ibu umumnya dibentuk lebih khusus lagi, misalnya arisan harian, arisan mingguan, dan arisan bulanan.

Salah satu kelompok arisan ibu-ibu RW IV, jumlah pinjaman kepada seluruh anggotanya mencapai lebih dari Rp10 juta. Dana tersebut diperoleh dari tabungan 26 anggota yang besarnya dibatasi Rp500 ribu per anggota. Bunga tabungan 4% per tahun dan bunga pinjaman 5% per tahun dengan waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan, paling lama satu tahun.

Setiap uang yang masuk pada saat pertemuan harus habis dipinjamkan kepada anggota yang belum meminjam atau anggota yang sebelumnya sudah melunasi pinjamannya. Besarnya pinjaman tergantung pada uang yang masuk dan banyaknya anggota yang akan meminjam. Biasanya anggota yang meminjam memberitahu sebelumnya, sehingga terdaftar sebagai calon peminjam pada pertemuan berikutnya. Besarnya SHU yang akan dibagikan kepada anggota diperoleh dari selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan anggota. Perhitungan perbankan yang sederhana ini sudah diterapkan sejak lama dan mereka mampu mengelola sendiri.

Selain kegiatan arisan dan simpan-pinjam, tabungan dana sosial yang sifatnya suka rela juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan arisan. Dana sosial tersebut digunakan jika ada anggota yang mendapat musibah atau sedang menghadapi keperluan mendesak, misalnya ketika salah satu anggota melahirkan. Walaupun jumlahnya tidak besar, yaitu berkisar Rp100-Rp500 per anggota ditambah sumbangan yang sifatnya spontanitas, para anggota kelompok merasa senang dapat berpartisipasi dalam kesempatan tersebut.

Pengelolaan keuangan dan manajemen kelompok arisan yang anggotanya ibu-ibu umumnya lebih baik dibandingkan dengan kelompok bapak-bapak. Faktor keberhasilan kelompok arisan ibu-ibu disebabkan: i) lebih disiplin dalam mentaati aturan; ii) lebih berani menagih atau menegur anggota yang belum membayar; dan

iii) lebih bersemangat dalam kegiatan yang berhubungan dengan uang. Sedangkan kelompok arisan bapak-bapak lebih bersemangat dalam membahas masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya atau membahas informasi lainnya.

Paguyuban

Kelompok paguyuban umumnya dibentuk melalui swadaya masyarakat, atau melalui pendampingan dari lembaga di luar masyarakat, seperti yayasan, LSM, atau lembaga lainnya. Kegiatan kelompok paguyuban tidak jauh berbeda dengan kegiatan kelompok arisan, namun keanggotaannya lebih khusus, seperti paguyuban kaki lima, dan paguyuban anak-anak jalanan. Anggota kelompok paguyuban tidak terbatas pada warga dari satu lingkungan masyarakat (RT, RW, dan kelurahan) tertentu.

Beberapa paguyuban yang ditemui pada saat penelitian adalah Paguyuban Perti I dan Perti III "*Penataan Ekonomi Rumah Tangga Intern*", Paguyuban Utama, Paguyuban Persatuan Pedagang Ayam (PPA), Paguyuban Pustaka "*Pusening Totokromo Atmojo*", Paguyuban Mitra "*Memeti Tentreming Anggota*", Paguyuban Cemeti "*Cermin Menuju Tatanan Hidup*", dan Paguyuban Al Hikmah.

1. Paguyuban Utama

Dibentuk pada tahun 1996, kini paguyuban ini telah mempunyai 23 anggota tukang gerobak sampah. Kegiatan paguyuban ini antara lain arisan, simpan pinjam, kegiatan sosial, pembinaan rohani. Paguyuban Utama ini mendapat bantuan dana, pembinaan agama Islam, pembinaan sosial, dan pembinaan ekonomi dari Yayasan Ghifari. Pinjaman maksimal saat ini mencapai Rp 150 ribu per anggota.

2. Paguyuban Perti I dan III

Salah satu tujuan paguyuban ini adalah agar sesuai dengan kepanjangan dari Perti, yaitu Penataan Ekonomi Rumah Tangga Intern. Paguyuban Perti I dan III berusaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan arisan dan simpan-pinjam. Anggota Perti I adalah pedagang kecil, antara lain penjual mie ayam dan warung makan, sedangkan anggota Perti III adalah pengusaha industri kerajinan. Saat ini banyak anggota Perti III yang sudah mempunyai usaha industri rumah tangga yang tergabung dalam Inkra (Industri Kerajinan Rakyat). Paguyuban Perti III ini mendapat bantuan dana Rp22,25 juta dan pembinaan dari Deperindag.

Pinjaman yang diberikan kepada anggota berkisar Rp1,5 juta - Rp3 juta. Pencairan dananya melalui BPD Kota Yogyakarta dengan bunga 7% per tahun.

3. Paguyuban Persatuan Pedagang Ayam (PPA)

Pasar Terban merupakan pusat pasar ayam kampung terbesar di Kota Yogyakarta. Paguyuban PPA dibentuk oleh para pedagang pada tahun 1985, saat ini mempunyai anggota aktif 10 orang. Paguyuban ini mempunyai kegiatan arisan dan simpan-pinjam.

Besarnya uang arisan Rp100 ribu per anggota yang diundi setiap satu bulan. Pinjaman yang terbesar mencapai Rp2juta dengan bunga 2% per bulan dan waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan anggota. Disamping itu ada iuran wajib Rp50 per keranjang ayam. Usaha kelompok ini mengalami penurunan sejak lima

tahun yang lalu. Hal ini terjadi karena pembayaran dari pembeli di Jakarta tidak lancar. Akibatnya pembayaran kepada pedagang ayam juga tersendat. Puncaknya terjadi saat krisis pada pertengahan bulan Juli 1997, ketika semua harga naik termasuk untuk biaya operasional.

4. Paguyuban Al Hikmah, Cemeti

Kelompok paguyuban ini mempunyai latar belakang keagamaan, sehingga kegiatannya lebih bersifat pembinaan rohani. Jenis usaha anggotanya sebagian besar adalah pedagang kue-kue gorengan.

Kegiatan kelompok paguyuban ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan kelompok lainnya, seperti arisan, simpan-pinjam, dan kegiatan sosial. Paguyuban ini tidak menetapkan bunga, tetapi *infaq*⁶, sesuai dengan ajaran agama Islam. Besarnya *infaq* tidak ditentukan, karena bersifat sukarela. Hal ini dilakukan karena masih terdapat beberapa pendapat mengenai bunga pinjaman.

5. Paguyuban Pustaka

Salah satu tujuan pembentukan Paguyuban Pustaka adalah untuk membantu masyarakat miskin yang tidak termasuk sebagai penerima program pemerintah. Paguyuban ini mempunyai tujuan khusus, yaitu melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan.⁷ Lembaga pemberi bantuan dana dan pendampingan adalah Yayasan Ghifari.

Bantuan yang diberikan berupa pinjaman dana pendidikan untuk anak-anak jalanan yang disalurkan melalui orang tuanya sebagai modal usaha atau untuk mengembangkan usaha yang sedang dilakukan. Usaha orang tua anak-anak jalanan tersebut antara lain sebagai pedagang sayuran dan pedagang gorengan.

Besarnya pinjaman berkisar antara Rp250 ribu - Rp300 ribu per KK. Diharapkan hasilnya dapat membantu biaya pendidikan anaknya. Untuk mengetahui usaha yang sedang dilakukan dan mengupayakan perkembangan usahanya, maka dibentuk kelompok arisan.

Kegiatan paguyuban sepenuhnya diserahkan kepada kelompok. Untuk menentukan siapa yang akan mendapat pinjaman, kelompok pemuda setempat mengumpulkan data masyarakat yang termasuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari masing-masing RT. Setelah data terkumpul, tim pemantau meninjau langsung calon penerima.

Pinjaman dikembalikan dalam waktu 10 bulan dalam bentuk tabungan, bukan cicilan. Hal ini untuk menghindari pengertian masyarakat mengenai bantuan, bahwa bantuan jika tidak dikembalikan juga tidak apa-apa. Dana pinjaman tidak dikembalikan kepada Yayasan Ghifari, tetapi digulirkan kepada anggota masyarakat yang lain.

⁶ Infaq : memberikan sebagian harta dengan suka rela dan ikhlas kepada yang berhak menerimanya.

⁷ Anak jalanan : anak usia sekolah (masih sekolah SD-SMP) yang berusaha sebagai penjual koran, penjual rokok di jalan raya, untuk membantu orang tuanya mencukupi biaya sekolah.

Paguyuban Pustaka juga mempunyai kegiatan arisan. Setiap anggota harus datang pada setiap pertemuan bulanan meskipun tidak bisa menabung. Tidak ada denda bagi anggota yang tidak menabung. Besarnya arisan Rp1.500 per anggota. Pertemuan diadakan secara bergantian di rumah anggota agar saling mengenal.

Kegiatan lainnya yang dilakukan pada pertemuan bulanan adalah pembinaan rohani, pembinaan manajemen dan evaluasi terhadap perkembangan usaha anggota, misalnya mengenai perkembangan jenis barang yang dijual dan peralatan yang sudah dimiliki. Anak-anaknya juga diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut agar orang tua mengetahui perkembangan pendidikan anak-anak mereka di sekolah.

6. Paguyuban Mitra (*Memeti Tentreming Anggota*)

Anggota Paguyuban Mitra tidak terbatas warga di lingkungan satu RW. Ini adalah paguyuban yang mempunyai kelompok dengan latar belakang yang berbeda, baik daerah maupun tingkat perekonomiannya. Kegiatan Paguyuban Mitra antara lain: arisan, simpan pinjam, menghimpun dana sosial, dan sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pengalaman. Prinsip dasar pembentukan paguyuban ini adalah pengembangan rohani, pengembangan ekonomi keluarga, dan proses pembelajaran.

7. Paguyuban Pedagang Pasar dan Pedagang Kali Lima

Paguyuban ini didirikan lima bulan yang lalu karena ada tawaran untuk modal awal Rp300 ribu dari Pasar Besar. Tawaran tersebut diterima, dilanjutkan dengan pembentukan paguyuban. Paguyuban ini sudah mempunyai anggota 80 orang, terdiri dari pedagang sayur, makanan, arang, daging, dan pedagang kecil lainnya.

Kegiatan yang dilakukan adalah arisan dan simpan-pinjam. Anggota paguyuban membayar iuran wajib setiap bulan Rp10.000 per orang, simpanan pokok dapat diambil setelah dua tahun. Disamping iuran wajib, anggota juga disarankan menabung yang besarnya tidak ditetapkan.

Besarnya pinjaman berkisar dari Rp25 ribu - Rp100 ribu dengan tingkat suku bunga 10%. Besar pinjaman yang diberikan kepada anggota rata-rata Rp100 ribu dengan waktu pengembalian lima bulan. Kegiatan arisan dan simpan-pinjam tersebut di buka setiap bulan sekali, dan uang yang terkumpul saat itu harus habis dipinjamkan.

8. Dasawisma

Kelompok arisan Dasawisma tidak jauh berbeda dengan dengan kelompok arisan RT dan RW. Perbedaannya hanya pada jumlah anggota. Pembentukan Dasawisma dibatasi oleh jumlah anggota tidak lebih dari sepuluh orang dan mempunyai tempat tinggal yang berdekatan. Pada pelaksanaannya anggota tidak harus terbatas sepuluh orang. Dasawisma juga mempunyai kegiatan arisan, simpan-pinjam, dan menghimpun dana sosial. Besarnya dana arisan, simpan-pinjam, dan dana sosial sepenuhnya tergantung pada kesepakatan anggota, demikian pula besarnya bunga dan lama pengembalian.

C. Kredit Program

UED (Usaha Ukonomi Desa)

UED adalah program dana bergulir pemerintah yang diluncurkan pada tahun 1985 melalui Departemen Sosial. UED di Kecamatan Gondokusuman yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik adalah UED di Kelurahan Terban (Trias Puspita) dan UED Kelurahan Klitren. Kegiatan simpan-pinjam dilaksanakan setiap bulan di loket UED di Kantor Kelurahan. Anggotanya adalah pedagang gorengan, pemilik warung makan, dan pemilik warung kelontong.

Syarat peminjaman antara lain: i) ada rekomendasi dari RT dan RW yang menyatakan kejujuran yang bersangkutan dan usahanya; ii) fotocopy KTP atau keterangan mengenai lama tinggal di wilayah tersebut; iii) simpanan wajib Rp13.000; dan iv) membayar biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman.

Besarnya bunga tergantung pada besarnya pinjaman. Jangka waktu pengembalian lima bulan. Saat ini pinjaman terbesar Rp1 juta per orang, pinjaman terendah Rp200 ribu. Sebelumnya besar pinjaman yang diberikan kepada anggota berkisar antara Rp20.000 - Rp100 ribu. Untuk pinjaman Rp100 ribu dikenakan bunga 2,5% per bulan.

Keuntungan yang diperoleh akan diberikan kepada seluruh anggota berupa SHU setiap tahun. Tidak ada ketentuan resmi mengenai keuntungan yang diterima pengelola karena tugas pengelola adalah membantu masyarakat, dan sebagai kegiatan sosial.

UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam)

UED-SP adalah program lanjutan dari UED. Program ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 1997, bertujuan untuk memberikan pinjaman pada usaha produktif. Dana diberikan pemerintah melalui PMD untuk UED-SP, yaitu sebesar Rp6 juta yang diterima dalam tiga tahap.

Besarnya pinjaman berkisar antara Rp50 ribu - Rp250 ribu diberikan kepada anggota yang sudah mempunyai usaha, antara lain pedagang bakulan, warung nasi, tambal ban, dan tukang patri.

Pada saat krisis banyak masyarakat membutuhkan pinjaman untuk menambah modal usaha atau membuka usaha baru. Karena nilai pinjaman relatif kecil, UED-SP banyak diakses oleh pedagang kecil. Bagi masyarakat yang di PHK akibat krisis dan tidak dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan formal seperti bank, UED-SP adalah salah satu sumber untuk mendapat pinjaman. Tetapi karena besarnya pinjaman dibatasi, mereka terpaksa mencari pinjaman dari sumber lain.

Setelah pemerintah meluncurkan program kredit baru P2KP, banyak anggota UED-SP di Kelurahan Terban yang beralih menjadi anggota atau nasabah program kredit baru tersebut. Jumlah anggota yang pada tahun 1999 mencapai 145 orang, saat ini berkurang banyak. Pengurangan anggota UED-SP ini menimbulkan rasa kecewa pengelola UED-SP. Mereka berharap adanya koordinasi antara pengelola UED-SP dan pengelola P2KP sebelum program kredit baru tersebut dilaksanakan, sehingga dapat menghindari masalah anggota UED-SP yang beralih ke P2KP.

Karena beberapa anggotanya beralih menjadi anggota P2KP, akibatnya usaha simpan-pinjam UED-SP mengalami kemacetan. Jumlah dana yang macet diperkirakan mencapai Rp1,5 juta. Sejak itu pengelola tidak berani menawarkan pinjaman kepada anggota lainnya. Akhirnya sisa dana disimpan di Simpedes.

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

UPPKS adalah program kredit lanjutan dari program UPPKA. Program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan simpan pinjam aseptor lestari (Apsari) yang dilaksanakan sebelum tahun 1990. UPPKS dilaksanakan di Kelurahan Terban dan Kelurahan Klitren sejak tahun 1997 di bawah pengawasan PLKB Kecamatan Gondokusuman.

Pada awal pembentukannya, UPPKS Kecamatan Gondokusuman mempunyai anggota 736 orang, terbagi atas 45 kelompok yang tersebar di lima kelurahan: i) Kelurahan Klitren (7 kelompok dengan anggota 111 orang; ii) Kelurahan Terban (12 kelompok dengan anggota 209 orang); iii) Kelurahan Demangan (4 kelompok dengan anggota 46 orang); iv) Kelurahan Kota Baru (5 kelompok dengan anggota 75 orang); dan v) Kelurahan Baciro (17 kelompok dengan anggota 287 orang).

Tidak semua kelompok UPPKS berkembang, karena hal ini sangat tergantung pada pengelolanya. UPPKS Melati I di Kelurahan Klitren dan UPPKS di Kelurahan Terban adalah contoh dua kelompok UPPKS yang berkembang.

Prinsip yang dijalankan UPPKS Melati I adalah kepercayaan, niat baik mengembalikan pinjaman, dan disiplin dalam membayar cicilan. Manajemen bersifat terbuka, sehingga setiap anggota, pengurus atau lembaga lain yang ingin mengetahui perkembangan kelompok tersebut dapat melihat laporan bulanan maupun laporan tahunan.

Laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota termasuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Negara (BKKBN) selaku pembina di tingkat kecamatan dan kota. Dalam laporan tersebut dicantumkan semua transaksi dan besarnya keuntungan yang akan diterima anggota dalam bentuk SHU. Keuntungan yang akan diterima oleh anggota ditentukan oleh jumlah simpanan, besar pinjaman, dan intensitas pinjaman. Disamping itu keuntungan yang akan diterima oleh pihak pengelola juga dicantumkan, yaitu 35% untuk ketua dan 65% untuk pengelola lainnya yang terdiri dari Ketua II, Bendahara I dan II, Sekretaris I dan II, dan pembantu umum.

Saat ini UPPKS Melati I sudah menjadi koperasi. Pada saat krisis banyak yang memanfaatkan UPPKS sebagai sumber pinjaman, misalnya beberapa responden yang di PHK, untuk membuka usaha wartel. Usaha menengah seperti industri mebel juga memanfaatkan UPPKS sebagai sumber kredit.

Beberapa alasan yang diberikan oleh anggota yang meminjam adalah persyaratan UPPKS mudah, prosesnya juga cepat, misalnya pinjaman Rp500 ribu - Rp1 juta dapat diberikan dalam sehari. Sedangkan pinjaman yang lebih besar memerlukan waktu paling lama tiga hari. Besarnya bunga yang diberikan 2% - 2,5% per bulan.

Pengurus juga membantu anggota melalui pameran dan promosi hasil usaha anggota. Hal ini menjadi daya tarik khusus bagi masyarakat untuk menjadi anggota. Karena

itu, anggota kelompok UPPKS Melati I tidak hanya berasal dari Kelurahan Klitren, tetapi juga dari kelurahan lain.

Perkembangan kelompok UPPKS tidak hanya bergantung pada pengurus kelompok, tetapi juga dukungan dari instansi terkait, terutama dalam memberikan rekomendasi untuk memperoleh pinjaman dari bank. BNI dan Bank Daya Ekonomi (BDE) merupakan dua bank yang ikut mengembangkan kelompok UPPKS (lihat Kotak 1).

Kotak 1
Beberapa Contoh Penggunaan Kredit
Nasabah UPPKS Melati I

- 1) Setelah di PHK dari tempat kerjanya, usaha yang dilakukan Bapak B adalah membuka Wartel (Warung Telepon). Karena uang pesangon dan tabungannya tidak cukup untuk memulai usaha tersebut, ia berusaha mencari pinjaman. Berdasarkan informasi dari teman-temannya, ia mengajukan pinjaman kepada UPPKS Melati I. Setelah disetujui oleh pihak pengelola, Bapak B mendapatkan pinjaman Rp2 juta dengan bunga 2% per bulan. Setelah melunasi pinjaman pertama, ia mengajukan pinjaman kedua Rp2,5 juta dengan bunga 2,5% per bulan. Walaupun bunga yang harus dibayar cukup tinggi, tetapi karena sangat memerlukan tambahan modal, ia terpaksa meminjam lagi. Pinjaman yang kedua digunakan untuk menambah unit Wartel yang ada. Selain Wartel, Bapak B juga mempunyai warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Dari usaha warung dan Wartel ia mendapat penghasilan bersih kurang lebih Rp1 juta per bulan.
- 2) Bapak G adalah salah seorang responden yang dapat mengembangkan usahanya setelah mendapat pinjaman dari UPPKS. Pinjaman pertama diperolehnya lima tahun yang lalu sebesar Rp500 ribu untuk memulai usaha sebagai penjahit. Pinjaman kedua sebesar Rp1 juta diajukan setelah pinjaman pertama lunas. Pinjaman yang ketiga Rp2,5 juta diterima pada bulan Agustus 2000 yang lalu. Pinjaman pertama dan kedua dilunasi dalam waktu 10 bulan dengan bunga 2,5% per bulan. Saat ini Bapak G sudah memiliki tiga mesin jahit, satu mesin obras, serta mempunyai tiga karyawan dengan upah Rp200 ribu per bulan. Bapak G memilih UPPKS sebagai sumber pinjaman karena persyaratannya mudah dan ia kenal dengan pengelolanya. Manfaat lain menjadi anggota UPPKS adalah pengelola ikut mempromosikan usaha anggota, dan membantu memecahkan masalah usaha. Disamping dibantu oleh pengelola, promosi juga dilakukan dengan menitipkan hasil produksinya di beberapa toko. Dari promosi tersebut, pesanan Bapak G bertambah.
- 3) Responden lainnya adalah Bapak S yang bekerja sebagai pembuat cinderamata untuk olah raga dan acara penting lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Bapak S mendapat tawaran pinjaman langsung dari ketua UPPKS. Pinjaman pertama Rp500 ribu diperoleh pada pertengahan tahun 1999 tanpa agunan. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman hanya satu hari. Manfaat langsung sebagai anggota UPPKS adalah pengelola membantu mempromosikan usaha yang bersangkutan. Sampai saat ini ia sudah mengikuti pameran lima kali. Rencana selanjutnya, setelah pinjaman pertama lunas, ia akan mengajukan pinjaman lagi dengan jumlah yang lebih besar untuk mengembangkan usaha.

Walaupun tidak sebesar kelompok UPPKS di Kelurahan Klitren, di Kelurahan Terban juga terdapat kelompok UPPKS yang berhasil. Jumlah anggotanya saat ini 31 orang, semuanya adalah ibu-ibu kelompok Apsari. Kelompok UPPKS Kelurahan Terban dibentuk pada tahun 1991 dengan anggota 46 orang. Dari modal awal sejumlah Rp500 ribu kini telah berkembang menjadi Rp21.011.209.

Banyaknya anggota yang menunggak cicilan pada saat krisis membuat pengelola kebingungan. Pada bulan Agustus 1998 tunggakan anggota mencapai Rp12 juta dengan lama tunggakan berkisar antara 1-8 bulan. Tunggakan cicilan umumnya disebabkan peminjam dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak dan sangat penting, seperti pendidikan anak dan kebutuhan dapur keluarga. Dengan dana terbatas, peminjam lebih memilih mengeluarkan biaya untuk kebutuhan makan sehari-hari dan biaya pendidikan. Apalagi pada saat menghadapi tahun ajaran baru yang membutuhkan banyak biaya untuk administrasi sekolah dan membeli buku. Akibatnya, cicilan anggota yang harus dibayarkan kepada kelompok menjadi terabaikan.

Setelah dilakukan evaluasi dengan seluruh anggota, pada tahun 1998 terjadi pengurangan anggota sebanyak 11 orang. Pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena pindah kerja, pindah tempat tinggal, dan pertimbangan terhadap anggota yang lain. Pada tahun 1999 ada 10 anggota yang ingin istirahat, artinya untuk sementara keluar dari keanggotaan UPPKS. Pada awal tahun 2000 keuangan kelompok normal kembali. Hal ini berkat usaha keras pengelola dan kesadaran anggota yang masih aktif dalam mengatasi masalah.

PDM-DKE

Kredit program lainnya yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir adalah PDM-DKE. Salah satu kelompok masyarakat yang mendapatkan dana dari PDM-DKE di Kelurahan Klitren adalah kelompok masyarakat (Pokmas) RW IV. Ketua kelompoknya adalah ketua RW IV. Pokmas RW IV yang diketuai oleh Ketua RW IV ini adalah salah satu Pokmas di Kecamatan Gondokusuman yang program perguliran dananya masih berjalan.

Pada saat penelitian, dana pinjaman tersebut sudah digulirkan dan pengelolaannya diserahkan kepada RT masing-masing sesuai dengan kesepakatan warga. Data Pinjaman PDM-DKE Tahap I dibawah ini menunjukkan jumlah penerima pinjaman, jenis usaha, dan jenis kelamin peminjam (lihat Tabel 9).

Sebagian besar kegiatan Pokmas di Kelurahan Terban dan di Kelurahan Klitren mengalami kemacetan karena adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa dana PDM-DKE merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan. Isu tersebut sangat menyulitkan pengelola pada saat melakukan penagihan kepada anggotanya, karena hampir semua anggota memberikan alasan bahwa "*dana tersebut adalah dana hibah, jadi tidak perlu dikembalikan. Lagi pula banyak pejabat melakukan korupsi yang nilainya sangat besar tetapi tidak di hukum. Jumlah pinjaman masyarakat tidak ada artinya dibandingkan dengan nilai uang yang dikorupsi. Masa harus dikembalikan ?*"

Tabel. 9 Data Pinjaman PDM-DKE Tahap I
Kelurahan Klitren

No.	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jenis Usaha	Jenis Kelamin
1.	140.000	(tidak ada data)	Perempuan
2.	180.000	Pedagang gorengan	Laki-laki
3.	100.000	Pedagang gorengan	Perempuan
4.	100.000	Jual koran	Laki-laki
5.	90.000	Jual koran	Laki-laki
6.	90.000	Jual koran	Laki-laki
7.	180.000	Sablon	Laki-laki
8.	100.000	Sablon	Laki-laki
9.	140.000	Warung makan	(tidak ada data)
10.	140.000	Warung makan	sda.
11.	140.000	Warung makan	sda.
12.	140.000	Warung makan	sda.
13.	140.000	Warung makan	sda.
14.	140.000	Warung makan	sda.
15.	200.000	Kerajinan	sda.
16.	200.000	Kerajinan	sda.
17.	125.000	Kerajinan	sda.

Sumber : Kuitansi penerimaan dana yang diperlihatkan oleh Ketua RW IV Kelurahan Klitren

1. P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)

Program bantuan untuk masyarakat miskin perkotaan yang terkena dampak krisis ini diberikan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui: i) penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja; ii) penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja; iii) peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif berdasarkan usaha kelompok; iv) penyiapan, pengembangan, dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan; dan v) pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Pada pelaksanaannya sasaran P2KP adalah masyarakat yang tergolong bukan sangat miskin karena jaminan pengembalian pinjaman harus lancar. Beberapa jenis usaha masyarakat yang mendapat pinjaman dari P2KP adalah warung makan, pedagang bakso, bengkel, warung kelontong, warung serba ada, penjahit, pedagang gorengan, pedagang sayuran, pedagang jam, dan reparasi jam.

Pada saat penelitian, pencairan dana P2KP di Kelurahan Terban dan Klitren mencapai 80%. Sedangkan sisanya 20% akan dicairkan paling lambat bulan Desember 2000. Dana yang sudah dialokasikan harus salurkan seluruhnya karena kalau tidak digunakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan maka sisa dana akan dihapuskan.

Lamanya proses pengajuan hingga pencairan pinjaman tergantung pada ketersediaan dana. Besarnya pinjaman yang disetujui untuk anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Terban berkisar antara Rp300 ribu - Rp2 juta, untuk Kelurahan Klitren antara Rp400 ribu - Rp11 juta dengan bunga 18% per tahun dan jangka waktu pengembalian 12 - 18 bulan. Walaupun bunga P2KP relatif kecil, masyarakat masih mengharapkan bunga yang lebih rendah. Lihat Kotak 2 mengenai profil salah seorang peminjam P2KP.

Anggota yang terlambat membayar harus membuat surat pernyataan kesanggupan pengembalian melalui petugas keliling, dan dikenakan bunga tambahan 1% per bulan dari angsuran pokok. Jadi pada bulan berikutnya anggota tersebut harus membayar angsuran ditambah denda. Sanksi yang paling keras adalah pencantuman nama anggota yang bermasalah di tempat-tempat strategis agar dapat diketahui oleh semua masyarakat. Sanksi ini dirasakan cukup efektif.

Kotak 2
Ibu YS dan P2KP : Strategi Keluarga Ibu Ys

Sebelum krisis suami Ibu YS mempunyai usaha bengkel dan menjual suku cadang velk sepeda motor. Pada saat krisis usaha suaminya mengalami penurunan karena suku cadang langka dan harganya tinggi. Sebelum krisis Ibu YS mempunyai usaha warung makan dekat Kampus UGM. Saat krisis warungnya menjadi sepi, akhirnya terpaksa ditutup. Ia membuka kembali warung makan di rumahnya sendiri setelah mendapat pinjaman dari P2KP.

Permohonan pinjaman yang diajukan untuk mengembangkan kedua usaha suami- isteri tersebut adalah Rp5 juta. Pinjaman yang disetujui Rp3 juta dengan bunga 1,5% per bulan dan waktu pengembalian 12 bulan. Pinjaman tersebut diterima pada bulan September 2000, pada saat pencairan dana P2KP tahap II. Sebetulnya pengajuan tersebut dibuat dengan harapan dapat diberikan pada saat pencairan tahap I. Tapi karena banyak KSM yang mengajukan kredit, pinjaman Ibu YS baru diterima pada pencairan tahap II. Pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha warung Rp1,5 juta, dan untuk usaha suaminya Rp1,5 juta.

IV. AKSES, HAMBATAN DAN PILIHAN MASYARAKAT TERHADAP KREDIT

A. Akses

Banyak masyarakat perkotaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pinjaman. Bagi mereka sulit sekali mengakses kredit dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan yang dimiliki, antara lain informasi tentang skema kredit, kemampuan membayar bunga yang ditetapkan, dan kesanggupan memenuhi persyaratan. Dengan keterbatasan tersebut beberapa orang terpaksa mengajukan permohonan dengan menggunakan nama orang lain yang memenuhi persyaratan lembaga keuangan tersebut. Pada saat penelitian, Tim SMERU telah bertemu dengan dua responden yang mendapat kredit atas nama mertuanya yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan atas nama temannya yang menjadi nasabah BRI Unit Terban dan BRI Unit Klitren.

Lembaga keuangan informal merupakan akses termudah bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman. Di Kelurahan Klitren dan Terban banyak ditemui bentuk-bentuk arisan serta paguyuban yang berperan sebagai sumber kredit. Karena dalam kelompok-kelompok arisan dan paguyuban setiap anggota diwajibkan untuk meminjam, maka anggota yang tidak membutuhkan pinjaman juga harus mengikuti aturan tersebut.

Kredit program yang ada di dua kelurahan penelitian dijadikan sebagai alternatif sumber pinjaman bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. Namun setiap program selalu mempunyai target atau sasaran penerima manfaat, sehingga hal ini juga membatasi masyarakat dalam mengakses kredit program. Sasaran atau target dari program selalu ditentukan oleh aturan yang sudah ditetapkan dan sangat tergantung pada latar belakang dan tujuan program itu sendiri.

B. Pilihan Masyarakat terhadap Kredit

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di dua kelurahan, BRI adalah salah satu bank yang diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan kredit. Masyarakat yang dimaksud adalah pegawai dan non-pegawai.

Masyarakat non-pegawai negeri memilih BRI karena besarnya bunga relatif rendah dibandingkan dengan bank lainnya, juga karena BRI memberikan IPTW, dan relatif lebih mudah diakses dibandingkan dengan bank lainnya.

Pegawai pemerintah memilih BRI sebagai sumber pinjaman karena mempunyai penghasilan tetap, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mempunyai informasi yang cukup mengenai kredit, dan tingkat suku bunga BRI lebih rendah dibandingkan dengan bank lainnya.

Selain lembaga keuangan formal, lembaga formal non-bank yang diminati adalah pegadaian. Masyarakat memilih pegadaian karena prosesnya cepat, bahkan dalam hitungan menit. Namun sebagian masyarakat masih merasa malu atau segan menggunakan jasa pegadaian.

Masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal, memilih lembaga keuangan informal seperti kelompok arisan, paguyuban, dan kredit program. Besarnya pinjaman sangat tergantung pada latar belakang ekonomi dan tujuan pembentukan arisan tersebut. Masyarakat cenderung memilih kelompok arisan dan paguyuban sebagai sumber kredit karena disamping kegiatan ekonomi, kelompok arisan juga merupakan kegiatan sosial yang besar manfaatnya bagi mereka.

Kredit program yang ada sebelum krisis seperti BUKP, UPPKS, UED, UED-SP, dan yang dibentuk untuk membantu masyarakat menghadapi krisis seperti PDM-DKE dan P2KP, merupakan pilihan bagi masyarakat meskipun tidak semua masyarakat memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dari program tersebut. Keberadaan kredit program dirasakan sangat bermanfaat apabila dikelola dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan, dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Hambatan

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman dibedakan menurut sifat dari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman.

1. Kredit Formal

Masyarakat sangat berminat untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank, namun mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga keuangan ini, terutama persyaratan mengenai jaminan.

Selain jaminan, persyaratan lain seperti SK jabatan terakhir hanya dapat dipenuhi oleh pegawai tetap negeri atau pegawai BUMN. Akibatnya, akses terhadap kredit formal masih terbatas dan hanya menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat perkotaan yang mampu memenuhi persyaratan.

2. Kredit informal

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengupayakan pinjaman dari lembaga keuangan informal seperti kelompok arisan, adalah jumlah pinjaman yang sangat terbatas. Kredit informal Paguyuban juga merupakan suatu sumber yang dapat diakses oleh masyarakat, namun besarnya pinjaman sangat tergantung pada latar belakang anggota dan tujuan paguyuban yang bersangkutan.

3. Kredit Program

Kredit program yang diturunkan umumnya selalu mempunyai sasaran atau target penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian tidak semua anggota masyarakat berhak mendapat kredit program. Beberapa kredit program yang ditemui di Kelurahan Klitren dan Kelurahan Terban berjalan sendiri-sendiri dengan aturan dan persyaratan masing-masing. Sehingga ada kesan bahwa adanya kredit program yang baru akan mengancam keberlanjutan kredit program yang sudah ada sebelumnya.

Tidak adanya koordinasi yang baik antara satu kredit program dengan kredit program yang lain juga merupakan hambatan yang mempengaruhi keberhasilan kredit program. Pengaturan dan koordinasi yang baik dapat dilaksanakan apabila terdapat kesinambungan antara kredit program baru dengan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, kredit program yang baru dapat memperoleh referensi calon anggota dengan reputasi yang baik dari program sebelumnya. Sebaliknya apabila ada calon anggota baru dari kredit program yang tidak memenuhi kriteria maka yang bersangkutan dapat diberikan referensi agar dapat diikuti-sertakan dalam kredit program lainnya.

Pengelola kredit program juga merupakan salah faktor penentu keberhasilan. Banyak kredit program gagal karena tidak didukung oleh pengelola yang handal. Pengelola harus memahami tujuan program, serta penetapan pengelola tersebut harus mendapat legitimasi dari masyarakat setempat agar keberadaan pengelola diakui dan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Pemberian informasi mengenai program secara tidak utuh dapat menjadi hambatan, karena kadang-kadang masyarakat tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari pihak pengelola sehingga dapat menimbulkan salah pengertian mengenai arti program itu sendiri.

Hambatan lain yang dirasakan oleh masyarakat dalam mengakses kredit program adalah hambatan administrasi. Masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengikuti aturan administrasi yang ditetapkan melalui buku petunjuk yang ada.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kredit perkotaan yang ada dan masih berjalan hingga saat ini di daerah penelitian dikelompokkan sebagai kredit formal, kredit informal, dan kredit program. Kredit formal terdiri dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank antara lain: BNI, BRI, BPR, dan BPD, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu pegadaian, BUKP dan koperasi. Kredit informal antara lain adalah arisan Dasawisma, arisan RT, arisan RW, arisan Kelurahan, Paguyuban, dan rentenir. Sementara Kredit program antara lain : UED, UED-SP, UPPKS, PDM-DKE, dan P2KP.
2. Kredit formal dikelola lembaga keuangan dalam bentuk bank dan koperasi yang diatur menurut undang-undang dengan sumber dana dari pemerintah, BUMN, perorangan, dan kelompok. Arisan dan paguyuban dikelola sebagai kegiatan simpan-pinjam dalam bentuk pertemuan rutin dengan sumber dana dari swadaya masyarakat.
3. Salah satu kredit program yang dinilai berhasil dan dapat diakses oleh masyarakat perkotaan saat ini adalah P2KP, walaupun persyaratan adminstrasinya dirasakan sulit oleh sebagian masyarakat, besarnya pinjaman tidak sesuai dengan yang diajukan karena ada verifikasi kelayakan usaha, dan penerima kredit tidak selalu masyarakat miskin. Sementara kredit-kredit program lain yang masih berjalan namun dengan kapasitasnya terbatas adalah UED-SP, UPPKS dan PDM-DKE.
4. Pinjaman dari kredit formal dan kredit informal digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif dan konsumtif. Sedangkan pinjaman dari kredit program umumnya digunakan untuk kegiatan produktif.
5. Kendala masyarakat dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal adalah persyaratan berupa jaminan, sehingga masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal akan memilih kredit informal dan kredit program yang mempunyai persyaratan sederhana dan tanpa jaminan.
6. Kendala pengelola kredit program dalam mengembangkan usahanya adalah tidak adanya modal tambahan. Salah satu UPPKS berhasil karena kerja keras pengelola dan karena adanya dukungan dari BKKBN sebagai pembina dalam memperoleh modal tambahan.

LAMPIRAN

Skema Kredit Formal, Informal, dan Program, serta Tahun Mulai Beroperasi di Wilayah Penelitian

No.	Nama Program	Tahun mulai	Bunga	Jangka waktu	Jangka cicilan	Persyaratan	Plafon Pinjaman
A	KREDIT FORMAL Lembaga Keuangan Bank						
1.	BRI (Kupedes)	*	24% per tahun merata	1 - 3 tahun	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> - ≤ Rp.1 juta tanpa jaminan - Rp. 1 juta : surat tanah (Letter C, D, atau sertifikat) - Surat dari kepala desa 	Rp25 ribu - Rp25 juta
2.	BPD						
	a. Kredit Investasi dan Modal Kerja	*	21% per tahun efektif	2 - 4 tahun	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> - ≤ Rp25 juta: memiliki usaha, sertifikat tanah atau BPKB - > 25 juta: syarat di atas + ijin usaha 	Minimal Rp2,5 juta
	b. Kredit Pensiun, Pegawai, dan Keluarga	*	27% per tahun efektif	4 tahun	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit Pensiun: SK Pensiun asli, usia maksimum 73 tahun - Kredit Pegawai: cicilan maksimum 50% dari gaji bersih - Kredit keluarga: Foto copy SK pegawai 	
3.	BCA	*	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
4.	Danamon	*	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
5.	Lippo	*	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
6.	BNI	*	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.

No.	Nama Program	Tahun mulai	Bunga	Jangka waktu	Jangka cicilan	Persyaratan	Plafon Pinjaman
7.	BPR						
	a. Kredit Pegawai	*	1,6% per bulan untuk pegawai di lingkungan Kota Yogyakarta, 1,75% di luar Kota Yogyakarta.	Maks 40 bulan	Bulanan	- Fotocopy SK pengangkatan terakhir, KTP/SIM, Pengajuan kredit ditandatangani bendahara dan kepala instansi - Syarat di atas + jaminan dari Badan Pengawas	≤ Rp10 juta > Rp10 juta
	b. Kredit Pedagang Pasar	*	3% per bulan efektif	Maks 6 bulan	Mingguan Harian	- Fotocopy KTP, surat kepala desa, Kartu Bukti Tanda Pedagang - Syarat di atas + jaminan (surat tanah, BPKB)	≤ Rp4 juta > Rp4 juta
	c. Program Kredit Mikro	**	2% per bulan efektif	t.a.d.	bulanan	- fotocopy KTP (bagi yang tidak memiliki Kartu Bukti Pedagang Pasar) - Fotocopy, Kartu Bukti Pedagang Pasar	≤ Rp500ribu ≤ Rp2 juta
	Lembaga Keuangan Bukan Bank						
8.	Pegadaian	*	2,5% - 3,5%	4 bulan	bulanan	Emas : KTP Kendaraan Bermotor : KTP, BPKB, STNK, dan surat pernyataan pemilik.	Rp5 ribu - Rp20 juta.

No.	Nama Program	Tahun mulai	Bunga	Jangka waktu	Jangka cicilan	Persyaratan	Plafon Pinjaman
9.	BUKP	*	2,4% - 4%	t.a.d. 20 minggu 18 bulan	Harian Mingguan bulanan	- Rumah tinggal di lingkungan Kec. Gondokusuman, Fotocopy KTP suami-istri, mempunyai usaha, diketahui (RT, RW, dan Kelurahan) - Syarat di atas + persetujuan Biro Perekonomian Tk. Propinsi Yogyakarta	Rp500 ribu - Rp2,5 juta > Rp2,5 juta
B.	KREDIT INFORMAL						
10.	Arisan a. Arisan RT b. Arisan RW c. Dasawisma	* * *	10% per tiga bulan t.a.d. t.a.d.	3 bulan ≤ 1 tahun t.a.d	Bulanan Bulanan Bulanan	Anggota (umumnya ibu-ibu) Anggota (umumnya bapak-bapak) Anggota (umumnya 10 orang)	Tergantung uang yang masuk Tergantung uang yang masuk Tergantung uang yang masuk
11.	Paguyuban a. Paguyuban Utama c. Perti III d. Paguyuban Pedagang Ayam e. Paguyuban Al Hikmah (Cemeti) f. Paguyuban Pustaka f. Paguyuban Mitra g. Paguyuban Pedagang Pasar dan Kaki Lima	* * * * * * *	t.a.d. 7% per tahun 2% per bulan suka rela 0% t.a.d. 10% per lima bulan	t.a.d. t.a.d. t.a.d. t.a.d. ≤ 10 bulan t.a.d. ≤ 5 bulan	Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan	Anggota (tukang gerobag sampah) Anggota (industri rumah tangga) Anggota (pedagang ayam Pasar Terban) Anggota (pedagang kue gorengan) Anggota (pedagang sayur dan pedagang gorengan) Anggota (umum) Anggota (pedagang dan kaki lima Pasar Terban)	≤ Rp.150 ribu Rp1,5 juta - Rp3 juta ≤ Rp2 juta t.a.d. Rp250 ribu - Rp300 ribu t.a.d. Rp25 ribu - Rp100 ribu.

No.	Nama Program	Tahun mulai	Bunga	Jangka waktu	Jangka cicilan	Persyaratan	Plafon Pinjaman
C.	KREDIT PROGRAM						
	a. Usaha Ekonomi Desa (UED)	*	2,5% per bulan	≤ 5 bulan	Bulanan	Anggota, rekomendasi RT dan RW, penduduk asli (sudah lama tinggal), simpanan wajib Rp13.000, biaya administrasi (1% dari pinjaman)	Rp20 ribu - Rp1 juta
	b. Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP)	*	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	Anggota yang mempunyai usaha	Rp50 ribu - Rp250 ribu t.a.d.
	c. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	*	2% - 2,5%	1 tahun	Bulanan	Anggota yang mempunyai usaha	Rp90 ribu - Rp200 ribu
	d. Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)	**	10% - 24% per tahun	1bulan - 1 tahun	Bulanan	Diutamakan KPS dan KS-1	
e. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	**	18% per tahun	18 bulan	Bulanan	Perorangan, mempunyai usaha, tergabung dalam KSM	Rp300 ribu - Rp11 juta	

Ket * : Sebelum krisis

** : Sesudah krisis

t.a.d. : tidak ada data